

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Iran-Israel

Marko Wijaya¹, Agung Afif²

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang; markowijaya70@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Tangerang; agungafif@umt.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Amerika Serikat;
Konflik;
Iran-Israel;

Article history:

Received 2025-07-07

Revised 2025-11-25

Accepted 2025-11-25

Corresponding Author:

Marko wijaya
Universitas Muhammadiyah
Tangerang;
markowijaya70@gmail.com

CopyRight:

This is an open access article under
the [CC BY-NC-SA](#) license.



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine involvement of the United States (US) in the Iran-Israel conflict. This conflict was triggered by the long-standing feud between Iran and Israel that has continued to heat up since the Iranian Revolution in 1979. The key event that became the study point of this research was the airstrike carried out by the United state (US) in 2020 that killed General Qassem Soleimani, the leader of Iran's Quds force, as well as Iran's counterattack that resulted in increased tension in the Middle East. Until 2025, the conflict continued with Iran launching drone and missile attacks on Israel in retaliation for attacks on Iranian diplomatic facilities. The United States (US) as Israel's main ally actively seeks to inhibit Iran's influence in the Middle East. The United States (US) provides military and diplomatic support to Israel to counter Iran's ambitions, including by supporting military operations in areas controlled by Iranian proxy militias such as in Syria and Iraq. This research uses Regional Hegemony theory and Rational Choice theory to analyze United States (US) interests in the Iran-Israel conflict in the region.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran dan kepentingan amerika serikat (AS) dalam konflik Iran-Israel. Konflik ini dipicu oleh perseteruan berkepanjangan antara Iran dan Israel yang terus memanas sejak Revolusi Iran tahun 1979. Peristiwa penting yang menjadi titik kajian pada penelitian ini adalah serangan udara yang dilakukan oleh AS pada tahun 2020 yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin pasukan Quds Iran, serta serangan balasan Iran yang mengakibatkan ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Hingga tahun 2025, konflik ini terus berlanjut dengan Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan yang dilakukan pada fasilitas diplomatik Iran. Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu utama Israel secara aktif berupaya menghambat pengaruh Iran di Timur Tengah. Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Israel untuk melawan ambisi Iran, termasuk dengan cara mendukung operasi militer di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh milisi proksi Iran seperti di Suriah dan Irak. Penelitian ini menggunakan teori Hegemoni Regional dan teori Rational Choice dalam menganalisis kepentingan Amerika Serikat (AS) dalam konflik Iran-Israel di kawasan ini.

1. PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah sering menjadi area konflik bagi negara-negara barat. Dalam perang saudara di Suriah tahun 2014 misalnya, keterlibatan pemangku kepentingan internasional tidak dapat di hindari. Sebagai sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, negara- negara seperti Turki, Qatar, dan Saudi Arabia mendanai dan mendukung pasukan oposisi untuk melawan Islamic State of Iraq and Suriah (Marshall, 2016). Sementara Iran dan Rusia sebagai sekutu Suriah mendukung dan mempertahankan rezim Bashar Al-Assad di

Damaskus (Haffidz, 2023). Ketegangan di Timur Tengah kian meningkat, dengan perseteruan antara Iran-Israel, menjadi pemicu utama gelombang ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

Konflik Iran-Israel berkembang setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979, Sebelumnya, hubungan antara Iran-Israel cukup dekat, terutama dalam bidang energi dan keamanan. Namun setelah revolusi, pandangan Iran terhadap Israel berubah drastis dan pemimpin Iran Ayatollah Khomeini menganggap Israel sebagai musuh utama, Iran kemudian mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Israel seperti Hizbullah di Libanon dan Hamas di Palestina yang memicu ketegangan. Israel merupakan satu-satunya negara yang berada di Kawasan mayoritas muslim, melihat dukungan Iran terhadap kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas sebagai ancaman terhadap keamanan regionalnya dan berusaha menghambat pengaruhnya dengan cara mendukung operasi militer dan melakukan serangan di wilayah-wilayah yang dianggap menjadi basis milisi proksi Iran, seperti di Suriah dan Lebanon. Konflik ini terus berkembang karena kedua negara berusaha memperkuat posisi mereka di Timur Tengah, hingga menciptakan ketegangan yang masih berlangsung sampai sekarang (Furlan, 2022).

Iran secara aktif mendukung kelompok militan seperti Hizbullah melalui pendanaan, pelatihan, dan memasok senjata melalui IRGC sejak tahun 1985 hingga 2000-an. Dukungan ini memperburuk konflik di kawasan, meningkatkan intensitas kekerasan dan ketegangan di Timur Tengah. Lanskap keamanan regional semakin kompleks karena melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, yang memanfaatkan ketegangan ini untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan bantuan dari Iran, Hizbullah terus terlibat dalam pertempuran yang intens melawan sekutu Israel (seperti Israel Defense Forces dan Tentara Lebanon Selatan). Pada tahun 2000, ratusan tentara Israel tewas di Lebanon. Akhirnya, pada Mei 2000, Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Peristiwa ini menandai pertama kalinya Israel menyerahkan wilayah Arab tanpa perjanjian damai (Nada, 2023).

Pada awal tahun 2020, ketegangan memuncak ketika Amerika Serikat membunuh Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) atau yang dikenal sebagai Pasukan Quds saat melancarkan serangan udara di Bandara Internasional Baghdad, Irak. Setelah serangan tersebut, Iran melakukan serangan balasan dengan mengirim puluhan rudal terhadap pangkalan militer AS di Irak (Al Jazeera, 2020). Ketegangan terus berlanjut hingga pada 14 April 2024, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel dengan mengirimkan ratusan drone dan rudal. Serangan tersebut merupakan respons atas pengeboman Kedutaan Besar Iran di Suriah yang terjadi pada 1 April 2024. Konflik yang berlangsung di Suriah mencerminkan intervensi yang disengaja oleh Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya karena dianggap menghalangi kepentingan geopolitik mereka di Timur Tengah (Suhayatmi, 2024).

Dalam konteks di atas, maka ada hal yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut, yaitu aktifnya AS dalam konflik Iran-Israel. Keterlibatan AS dalam konflik ini menunjukkan dinamika global yang lebih luas, dimana AS ingin mempertahankan dominasinya, menciptakan ketegangan yang dapat memengaruhi stabilitas regional dan global. Tulisan ini ingin mengidentifikasi motif atau kepentingan yang melatarbelakangi mengapa AS terlibat dalam konflik tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, penulis akan menjelaskan kepentingan AS dalam konflik Iran-Israel serta bagaimana AS berupaya mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah melalui dukungannya terhadap Israel, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data, pembahasan hingga kesimpulan.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

A. Sejarah dan perkembangan konflik Iran-Israel

Konflik Iran-Israel berkembang setelah terjadinya Revolusi Iran tahun 1979. Sebelumnya, Iran dan Israel memiliki hubungan yang cukup dekat selama pemerintahan Pahlavi, yang memerintah Iran dari tahun 1925 hingga digulingkan dalam revolusi tahun 1979. Pahlavi dikenal dengan orientasinya yang pro-barat tergantikan oleh Ayatollah Khomeini yang mendeklarasikan Iran sebagai Republik Islam yang anti-Zionis. Pemimpin Tertinggi saat ini, Ali Khamenei menganggap Israel sebagai musuh utama. Setelah perang Iran-Irak berakhir, Iran kemudian memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Israel, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, yang terus memicu ketegangan. Konflik antara Hizbullah dan Israel dimulai pada tahun 1982, ketika Israel menginvasi Lebanon. Hizbullah terbentuk sebagai kelompok perlawanan yang bertujuan mengusir pasukan Israel dari Lebanon. Hal ini dikarenakan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan terus berlanjut tanpa gagasan yang jelas mengenai tujuan utamanya. Seiring waktu, Hizbullah berkembang menjadi kelompok militan yang berperang dengan Israel, termasuk dalam Perang Lebanon 2006, hingga terlibat dalam ketegangan di perbatasan (Al-Jazerra, 2024).

Sejak Hamas mengambil alih kendali atas Jalur Gaza pada tahun 2007, Hamas telah terlibat dalam beberapa konflik dengan Israel dengan dukungan dari Iran. Departemen Luar Negeri menilai bahwa Iran menyediakan hingga \$100 juta per tahun dalam bentuk dukungan gabungan untuk kelompok teroris Palestina, termasuk Hamas (Thomas, 2024). Israel, di sisi lain, sebagai satu-satunya negara Yahudi di kawasan mayoritas muslim, melihat dukungan Iran terhadap kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas sebagai ancaman terhadap keamanan regionalnya dan berusaha menghambat pengaruhnya dengan cara mendukung operasi militer dan melakukan serangan di wilayah-wilayah yang dianggap menjadi markas proksi Iran, seperti di Suriah dan Lebanon. Konflik ini terus berkembang karena kedua negara berusaha memperkuat posisi mereka di Timur Tengah, hingga menciptakan ketegangan yang masih berlangsung sampai sekarang (Furlan, 2022).

Pada 12 Januari 2010, Ali Mohammadi yang merupakan ilmuwan nuklir terbunuh akibat bom yang dikendalikan dari jarak jauh yang dipasang di mobilnya ketika ia meninggalkan rumah untuk berangkat kerja. Pada 29 November 2010, Shariari dan Abbasi Davani ilmuwan nuklir Iran juga tewas akibat bom yang ditanam di mobilnya. Pada 11 Januari 2012, Ahmadi Roshan juga tewas akibat bom yang terpasang pada mobilnya. Iran menganggap Israel dan AS bertanggung jawab atas pembunuhan ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran (Jedenia, 2020).

Keterlibatan pemangku kepentingan internasional tidak dapat dihindari dalam konflik di Timur Tengah, seperti yang terjadi dalam perang saudara di Suriah tahun 2014. Sebagai sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, negara-negara seperti Turki, Qatar, dan Arab Saudi mendanai dan mendukung pasukan oposisi untuk melawan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Suriah (Marshall, 2016). Sementara, Iran dan Rusia sebagai sekutu Suriah mendukung dan mempertahankan rezim Bashar al-Assad di Damaskus (Hafidz, 2023). Upaya rekonsiliasi konflik melalui resolusi Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat menemui jalan buntu sebagai oposisi untuk meruntuhkan pemerintah Suriah sehingga Bashar Al-Ashad masih bertahan (Mustofa & syarifah, 2021).

AS dan Iran terlibat dalam perang proksi kembali di Yaman, seperti halnya di Suriah. AS yang berusaha mendukung pemerintah melalui dukungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) berusaha untuk mendukung rezim Saleh. Sedangkan Iran mendukung oposisi Houthis untuk meruntuhkan rezim Saleh yang dianggap sebagai pemimpin yang korup,

diktator, dan tidak pro rakyat. Akhirnya, setelah revolusi Yaman berakhir, rezim Saleh gugur setelah berkuasa selama 33 tahun pada 5 Juni 2011 (Mustofa & syarifah, 2021).

Pada 3 Januari 2020, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara di Bandara Internasional Baghdad, Irak yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin Pasukan Quds atau Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF), yang dikenal sebagai tokoh penting dalam operasi militer dan strategi keamanan Iran di Timur Tengah. Pembunuhan Soleimani dianggap sebagai tindakan pencegahan oleh pemerintah AS terhadap ancaman yang sedang direncanakan Iran. Soleimani dianggap sedang merencanakan serangan terhadap pasukan militer AS di Irak dan dianggap bertanggung jawab atas tewasnya ratusan personel Amerika dan sekutu, melalui serangan Hezbollah (kelompok milisi yang didukung oleh Iran) di Irak. Sebagai respons langsung terhadap serangan tersebut, Iran melakukan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Pada 8 Januari 2020, puluhan rudal ditembakkan ke arah pangkalan udara Al-Asad di Irak, yang menampung pasukan AS. Serangan tersebut menjadi simbol penolakan Iran terhadap dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Serangan ini memberikan pesan kuat tentang komitmen Iran dalam mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah (Al-Jazeera, 2020).

Ketegangan antara kedua negara tidak berakhir di sana. Respon AS terhadap peristiwa-peristiwa ini cenderung berfokus pada penguatan hubungan dengan Israel dan menjaga kepentingan strategis AS di Timur Tengah. Pada 27 November 2020, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran kembali terjadi, Mohsen Fakhrizadeh, menjadi titik balik dalam hubungan antara AS, Israel, dan Iran, Meski pemerintah AS tidak memberikan konfirmasi langsung tentang keterlibatan mereka, seorang pejabat senior AS menyebutkan bahwa Israel bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan AS cenderung mendukung tindakan Israel terhadap Iran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah perkembangan senjata nuklir Iran, meskipun AS tidak terlibat langsung dalam serangan tersebut (Usip, 2022).

Serangan lainnya terjadi pada 25 Mei 2022, ketika sebuah drone diluncurkan dari dalam Iran menyerang kompleks militer Parchin yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Iran. Iran menganggap serangan tersebut disebabkan oleh Israel. Di sisi lain, Pejabat AS mengonfirmasi bahwa drone tersebut menghantam lokasi yang dimaksud, namun mereka menolak mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Keengganan AS untuk memberikan pernyataan lebih lanjut mencerminkan upaya untuk menjaga jarak dari keterlibatan langsung dalam serangan, meskipun pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan Israel (Usip, 2022).

Pada 28 Januari 2023, sebuah drone dengan bahan peledak menyerang fasilitas militer di Isfahan, Iran (Al Jazeera, 2023). Pejabat intelijen AS kemudian mengonfirmasi bahwa serangan tersebut dilakukan oleh Mossad, badan intelijen Israel. AS lebih terbuka dalam mengakui keterlibatan Israel, yang memperjelas posisi mereka dalam mendukung langkah-langkah Israel untuk menekan aktivitas nuklir Iran. Respon AS yang lebih terbuka namun tetap menghindari konfrontasi langsung menunjukkan dukungannya terhadap sekutunya (Usip, 2022).

Pada oktober 2023, Hizbullah melakukan serangan dengan meluncurkan roket ke Israel setelah serangan terhadap sekutunya Hamas di Gaza (Al Jazeera, 2023). Israel juga meluncurkan serangan udara balasan terhadap markas-markas kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon pada 23 September 2024. Serangan ini memakan 490 korban jiwa. Serangan Israel terus berlanjut hingga 27 September 2024, serangan udara tersebut menyerang markas bawah tanah Hizbullah di Beirut. Serangan tersebut menewaskan Hassan Nasrallah pemimpin Hizbullah. Hassan bekerja sama dengan Islamic Revolutionary

Guard Corps (IRGC) untuk memperkuat kekuatan militer kelompoknya dengan puluhan rudal canggih dan roket yang dipasok oleh Iran (Ippin, 2024).

Pada 1 April 2024, serangan udara Israel menargetkan Gedung Kedutaan Besar Iran di Damaskus, Suriah, yang menyebabkan tewasnya sejumlah pejabat, termasuk jenderal dari Korps Garda Revolusi Islam atau yang dikenal IRGC. Meskipun AS mengonfirmasi adanya serangan terhadap Gedung Kedutaan Besar Iran, mereka memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Keengganan AS untuk berbicara tentang serangan ini mencerminkan kebijakan hati-hati yang diambil oleh pemerintah AS dalam menghindari peningkatan ketegangan internasional lebih lanjut (Usip, 2022).

Pada 19 April 2024, Israel meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan udara dan fasilitas nuklir Iran di Isfahan sebagai balasan terhadap serangan Iran sebelumnya. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa Israel yang meluncurkan rudal tersebut. Meski demikian, pihak Iran membantah klaim tersebut dan menyebutkan bahwa upaya serangan Israel gagal. Keputusan AS dalam mengonfirmasi serangan tersebut mencerminkan dukungannya terhadap Israel (Usip, 2022). Pada 31 Juli 2024, pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, memicu pernyataan dari Menteri Luar Negeri AS yang menegaskan bahwa AS tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, peristiwa ini mencerminkan arah kebijakan AS dalam konflik Iran-Israel. Sikap AS yang terkesan netral tetap menunjukkan keberpihakan terhadap Israel (Usip, 2024).

Pada 1 Oktober 2024, Iran meluncurkan serangan rudal terhadap pangkalan militer Israel di wilayah Tel Aviv sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap orang-orang di Gaza dan Lebanon, serta pembunuhan para pemimpin tinggi IRGC, Hamas, dan Hizbullah. Serangan ini menandai serangan militer kedua yang dilakukan Iran terhadap Israel pada tahun 2024. Pada 26 Oktober 2024, Israel membalas serangan langsung Iran tersebut dengan meluncurkan serangan udara ke Iran, yang menargetkan lokasi pembuatan rudal dan drone milik Iran. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden merespon aksi serangan Israel terhadap Iran tersebut dengan mengatakan ia berharap serangan Israel tersebut menjadi "akhir" dari eskalasi konflik kedua negara ini (Graham&Harrison, 2024).

Pada Juni 2025, setelah serangan Israel, Iran meluncurkan operasi balasan berskala besar terhadap serangan Israel, menggunakan lebih dari 1.000 proyektil termasuk rudal balistik, rudal jelajah, dan puluhan drone menyerang dari beberapa wilayah Iran yang diarahkan ke kota-kota strategis Israel seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Serangan tersebut menarget sistem pertahanan udara Israel dengan tujuan menembus radar dan menciptakan tekanan terhadap kekuatan militer Israel, sekaligus menyatakan Iran menanggapi serangan brutal Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer mereka sebagai deklarasi perang. Respons pertahanan Israel diklaim cukup efektif – sistem Iron Dome, David's Sling, serta rudal Arrow-2 dan Arrow-3 mampu menangkis sebagian besar serangan, dengan tingkat intersepsi di atas 90% menurut klaim rezim Israel. Meskipun demikian, beberapa rudal dan drone berhasil menembus garis pertahanan, menyebabkan puluhan korban luka dan kerusakan pada infrastruktur sipil, misalnya serangan di Haifa merusak pelabuhan dan bangunan di sekitarnya. Akibat serangan ini, terjadi korban jiwa dan luka serius di Israel pada hari itu dan hari-hari berikutnya. Pada 14 Juni tercatat setidaknya 10-14 orang tewas dan puluhan hingga ratusan terluka akibat rudal yang menembus pertahanan. Misalnya, di Tel Aviv dan Ramat Gan terdapat satu kematian dan 63 luka-luka; laporan selanjutnya menunjukkan tambahan 3 tewas dan 172 terluka, serta korban sipil di utara Israel termasuk 5 tewas di Haifa.

Pada hari yang sama, Iran meluncurkan operasi balasan berskala besar terhadap serangan Israel, menggunakan lebih dari 1.000 proyektil termasuk rudal balistik, rudal jelajah, dan puluhan drone menyerang dari beberapa wilayah Iran yang diarahkan ke kota-kota

strategis Israel seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Serangan tersebut menarget sistem pertahanan udara Israel dengan tujuan menembus radar dan menciptakan tekanan terhadap kekuatan militer Israel, sekaligus menyatakan Iran menanggapi serangan brutal Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer mereka sebagai deklarasi perang.

B. Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam konflik Iran-Israel

Meskipun terpisah secara geografis, Amerika Serikat memiliki kepentingan geopolitik yang mendalam terhadap konflik Iran-Israel. AS sebagai kekuatan hegemon regional memainkan peran penting dalam dinamika konflik Iran-Israel untuk mempertahankan dominasinya di Timur Tengah. AS berkepentingan untuk menjaga stabilitas di kawasan dan melindungi sekutunya Israel dengan memprioritaskan pada pengurangan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, baik melalui program nuklirnya maupun dukungan terhadap kelompok militannya. Dalam teori hegemoni regional, negara hegemon memiliki kontrol atas struktur kekuasaan, yang mencerminkan kemampuan negara dalam memengaruhi dan mengarahkan dinamika melalui sebuah struktur. Dengan struktur kekuasaan, negara hegemon dapat menempatkan dirinya pada posisi sentral dalam sistem yang dibentuknya.

Salah satu langkah penting AS dalam mempertahankan dominasinya adalah mengurangi pengaruh Iran melalui kebijakan sanksi. Pemberlakuan sanksi AS terhadap Iran telah ada sejak lama. Sanksi AS terhadap Iran pertama kali diberlakukan pada tahun 1979, saat terjadi penyanderaan pada 53 orang Amerika selama 444 hari yang memicu AS menjatuhkan sanksi perdagangan dan keuangan untuk membebaskan mereka. Selama tahun 1980-an, sanksi AS terhadap Iran mencakup berbagai hal seperti: embargo minyak Iran, pelarangan ekspor bahan senjata kimia, pesawat, suku cadang, dan peralatan selam untuk menanggapi ancaman serangan ranjau di Teluk Persia dan keterlibatannya dalam perang Iran-Irak. Pada tahun 1990-an, fokus sanksi beralih pada sektor energi, ekonomi, dan ekspor senjata terhadap Iran untuk melemahkan kekuatan ekonomi dan menekan program rudal dan nuklir Iran (Ataev, 2013).

Pada tahun 2000-an, AS telah memberlakukan sanksi berdasarkan perintah eksekutif presiden dan undang-undang untuk menanggapi Iran terkait isu-isu seperti terorisme, proliferasi nuklir, pengembangan rudal balistik, pelanggaran hak asasi manusia, dan kegiatan ekonomi terkait. Beberapa perintah eksekutif berfokus pada entitas yang mendukung terorisme dan proliferasi nuklir (seperti Executive Order 13224 tahun 2001 dan Executive Order 13382 tahun 2005). Sanksi semakin diperketat yang menargetkan pejabat yang telah melanggar Hak Asasi Manusia (Executive Order 13553 tahun 2010), serta sanksi pada sektor energi (Executive Order 13590 tahun 2011) dan perbankan (Pasal 1245 National Defense Authorization Act tahun 2012) (Usip, 2024).

Pada masa pemerintahan Trump, sanksi terhadap Iran mencakup beberapa sektor seperti: militer, perbankan, industri penerbangan dan pengiriman, pemasok senjata, media, perusahaan teknologi, serta entitas asing yang membeli minyak atau berdagang dengan Iran. Selain itu, AS juga menjatuhkan sanksi langsung pada sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Menteri Dalam Negeri, kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan lima anggota Dewan Wali. Tindakan ini bertujuan untuk menekan ekonomi dan pengaruh politik Iran di tingkat domestik dan internasional (Usip, 2024).

Pada masa pemerintahan Biden, sanksi terhadap Iran yang dibuat selama pemerintahan Trump tetap dipertahankan sebagai bagian dari "tekanan maksimum". Namun, pemerintahan Biden juga menunjukkan kesediannya untuk mencabut sanksi setelah terjadi perubahan perilaku atau status pada individu yang dikenakan sanksi. Selama tahun 2021-

2024, AS memberlakukan sanksi terhadap Iran mencakup berbagai masalah seperti: pengembangan nuklir, produksi drone dan rudal, ekspor drone ke Rusia, penyelundupan minyak, kekerasan terhadap pengunjuk rasa, dan aktivitas terorisme. AS juga menargetkan sektor energi, lembaga keuangan, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Iran. Selain itu, AS juga menjatuhkan sanksi kepada puluhan pejabat pemerintah, termasuk kelompok militan Iran, media pemerintah, serta individu atau entitas yang mendukung aktivitas Iran yang melanggar hukum internasional (Usip, 2024).

Dalam menghadapi sanksi internasional, hubungan Iran dengan Cina dan Rusia sangat membantu Iran menghadapi dampak sanksi tersebut. Dengan Cina, Iran memperkuat kerja sama di bidang perdagangan energi. Pada tahun 2019, Cina tetap mengimpor minyak dari Iran, meskipun terdapat sanksi internasional. Bahkan, minyak Iran disimpan di pelabuhan-pelabuhan Cina, seperti Tianjin dan Jinzhou, sehingga Iran dapat menjual minyaknya ke negara-negara Asia tanpa terkena tarif. Pada tahun 2021, Cina dan Iran juga menandatangani perjanjian kerja sama 25 tahun senilai \$400 miliar. Perjanjian ini dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kegiatan industri di Iran secara komprehensif.

Hubungan Iran dengan Rusia juga didasarkan hubungan kerja sama ekonomi dan militer. Salah satu bentuk kerja sama mereka adalah ketika Iran mengekspor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mendukung operasi militer Rusia dalam perang di Ukraina. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat posisi geopolitik kedua negara dalam menghadapi sanksi AS yang menargetkan ekonomi dan aktivitas militer mereka. Kerja sama ini menjadi alat penting bagi Iran dan Rusia untuk melawan sanksi internasional yang dipimpin oleh AS (Thomas, 2024).

Keterlibatan AS terlihat melalui upaya mendorong Iran kembali ke meja perundingan terkait program nuklirnya, terutama setelah keluarnya AS dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018. Kebijakan AS di bawah Presiden Donald Trump terhadap konflik Iran-Israel pada tahun 2018 membuat AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA). JCPOA adalah kesepakatan di mana Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya sebagai gantinya sanksi ekonomi yang dikenakan padanya dapat dicabut (Mikail, 2018). Program nuklir Iran dianggap sebagai ancaman langsung terhadap Israel, sehingga pengendalian aktivitas ini menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS (Youvan, 2024). Pada tahun 2021-2022, kesepakatan nuklir JCPOA kembali berkembang dibawah presiden Biden melalui upaya negosiasi untuk membangun kepatuhan bersama terhadap JCPOA. Namun, tantangan muncul akibat tuntutan Iran terkait jaminan bahwa AS tidak akan keluar dari kesepakatan lagi, serta aksi keras pemerintah Iran terhadap kerusuhan nasional. Akhirnya negosiasi terhenti pada tahun 2022, sementara Iran terus meningkatkan aktivitas nuklirnya dan membatasi akses inspektur internasional yang berimbas menghambat prospek kesepakatan tersebut (Thomas, 2024).

Kerja sama militer AS-Israel juga mencakup latihan militer bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi konflik dengan Iran. Pada Januari 2023, latihan gabungan (Juniper Oak) yang melibatkan pasukan darat, udara, dan laut kedua negara difokuskan pada simulasi skenario serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Latihan ini menegaskan kemampuan militer AS dan Israel untuk merespons ancaman Iran secara terpadu. Selain itu, setelah Iran melancarkan serangan misil dan drone ke Israel. Pada Oktober 2024, AS mengirimkan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ke Israel. Program ini dirancang untuk mencegah misil balistik, sehingga dapat memperkuat pertahanan udara Israel. AS juga menawarkan personel untuk mengoperasikan program tersebut (Baldor, 2024). Pendekatan militer AS terhadap konflik Iran-Israel mencerminkan strategi yang terintegrasi, di mana kekuatan dan bantuan militer

digunakan secara sinergis untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini membuat kebijakan ini tidak hanya memperkuat hubungan AS-Israel tetapi juga melindungi kepentingan strategis AS di Timur Tengah.

Kebijakan AS melalui Perjanjian Abraham untuk membangun blok regional yang mendukung Israel sebagai sekutunya dalam menghadapi ancaman Iran. Pada September 2020, Perjanjian Abraham (Abraham Accords) menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab (seperti UEA, Bahrain, Arab Saudi, Sudan, dan Maroko). Normalisasi hubungan ini memberikan Israel dukungan tambahan yang memperkuat posisinya di kawasan, sementara bagi AS, hal ini menjadi instrumen penting untuk mengurangi pengaruh Iran terhadap stabilitas kawasan. Perjanjian Abraham juga membantu mengurangi ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab.

Pada 2 Februari 2024, pasukan AS meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas milik Pasukan Quds (IRGC-QF) di Irak dan Suriah, sebagai respons atas serangan terhadap pangkalan AS di perbatasan Yordania dan Suriah. Langkah ini menunjukkan komitmen AS dalam melindungi kepentingannya di kawasan, sekaligus memperingatkan Iran agar tidak meningkatkan agresi militernya. Serangan ini memperkuat wacana bahwa Iran adalah aktor agresif yang memerlukan respons militer, sehingga respon AS termasuk langkah preventif untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dengan Iran.

Ketika konflik Israel-Hamas semakin meningkat pada 7 Oktober 2023, para pejabat AS dan beberapa anggota parlemen mulai menunjukkan kekhawatiran terkait tindakan Israel di Tepi Barat yang dapat membahayakan nyawa warga Palestina. Pada 5 Desember 2023, AS mengambil langkah dengan memberlakukan larangan visa kepada delapan pemukim ekstremis Israel serta penundaan pengiriman senjata ke Israel, yang berpotensi digunakan untuk tindakan yang membahayakan warga sipil Palestina. Pendekatan ini menunjukkan komitmen AS untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. AS berupaya menyeimbangkan antara mendukung Israel dan menghindari eskalasi konflik regional.

C. Keterlibatan dan Kepentingan Amerika Serikat (AS)

Tindakan Amerika Serikat dalam meningkatkan patroli dan kehadiran militer di Selat Hormuz serta Teluk Oman mencerminkan penerapan teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) yang menekankan bahwa negara sebagai aktor rasional membuat keputusan berdasarkan analisis manfaat dan biaya untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Langkah Amerika Serikat seperti mengerahkan kapal perang dan jet tempur di jalur strategis ini dilakukan untuk melindungi pengiriman minyak yang penting bagi perekonomian global serta memastikan kebebasan navigasi di jalur tersebut. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan potensi biaya dari eskalasi konflik yang lebih besar serta manfaat berupa jalur energi yang vital bagi perekonomian global dan posisi strategis Amerika Serikat di kawasan (Ishiyama & Breuning, 2011).

Dengan menerapkan prinsip "pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan yang ditentukan." Menurut Allison, Amerika Serikat sebagai pembuat keputusan rasional akan memilih alternatif yang menghasilkan konsekuensi paling diinginkan. Seperti memberikan dukungan militer kepada Israel untuk meminimalkan ancaman dari Iran sekaligus dapat mempertahankan dominasinya di Timur Tengah. Dalam konteks keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel, teori ini membantu menjelaskan bagaimana Amerika Serikat merumuskan kebijakan yang bertujuan memaksimalkan kepentingannya di Timur Tengah sambil meminimalkan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Amerika Serikat harus menimbang faktor seperti ancaman dari program nuklir Iran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militannya. Sehingga, setiap

keputusan Amerika Serikat dirancang berdasarkan evaluasi terhadap manfaat dan biaya, dengan tujuan utama untuk melindungi stabilitas kawasan dan memastikan dominasi Amerika Serikat tetap terjaga. Pendekatan ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber dayanya secara optimal melalui diplomasi, ekonomi, hingga militer guna mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah.

Serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas Pasukan Quds (IRGC-QF) di Irak dan Suriah mencerminkan langkah Amerika Serikat sebagai aktor rasional. Amerika Serikat mengambil langkah strategis untuk melindungi kepentingan keamanan dan pengaruhnya di kawasan. Tindakan ini tidak hanya merupakan respons terhadap ancaman langsung yang terjadi pada pangkalan Amerika Serikat. Namun juga untuk mencegah Iran meningkatkan agresi militernya dan menghindari eskalasi konflik lebih besar. Demikian juga, pada kebijakan Amerika Serikat yang menunda pengiriman senjata ke Israel dan memberlakukan larangan visa bagi pemukim ekstremis mencerminkan perhitungan yang rasional guna menyeimbangkan dukungannya terhadap Israel dengan komitmennya pada hukum internasional serta mencegah eskalasi ketegangan regional yang dapat merugikan kepentingan strategisnya.

Kerusuhan nasional di Iran dipicu oleh kasus kematian Mahsa Amini, pada September 2022, yang ditangkap oleh Polisi Moralitas Iran karena melanggar hukum wajib hijab dan meninggal setelah dipukuli di dalam tahanan, peristiwa ini memicu protes di seluruh negeri, para demonstran menyuarakan berbagai macam keluhan, salah satunya diakhirinya Republik Islam Iran. Dalam meredam protes di seluruh negeri pemerintah Iran mengerahkan pasukan keamanan yang mengakibatkan tewasnya ratusan pengunjuk rasa dan ditangkapnya ribuan pengunjuk rasa lainnya. Menanggapi protes tersebut, Pemerintahan Biden memberikan sanksi yang menargetkan Polisi Moralitas Iran dan pejabat pemerintah lainnya atas peran mereka dalam tindakan keras tersebut, dan mengeluarkan Iran dari Komisi Status Perempuan PBB pada Desember 2022 (Thomas, 2024). Tindakan pemberian sanksi terhadap Iran setelah kematian Mahsa Amini menekankan bahwa AS sebagai aktor rasional mengambil keputusan tersebut untuk memberikan tekanan politik terhadap Iran, serta memperkuat citra Amerika Serikat sebagai pembela hak asasi manusia.

Dengan menjamin keamanan Israel, sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat (AS). Jika aksi teroris atau agresi diktator dibiarkan, hal itu hanya akan memperburuk ketegangan sekaligus meningkatkan ancaman bagi Amerika Serikat dan dunia. Iran yang mendukung Rusia di Ukraina serta Hamas, Hizbullah, dan kelompok teroris lainnya di kawasan, menunjukkan pentingnya peran Amerika Serikat sebagai hegemon regional dalam menjaga stabilitas Timur Tengah. Aliansi yang dibangun Amerika Serikat tidak hanya melindungi kepentingannya tetapi juga menjadikannya mitra yang diandalkan banyak negara di kawasan Timur Tengah. Berpaling dari Israel akan melemahkan posisi strategis ini. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendukung dan mendanai mitra penting seperti Israel sebagai investasi jangka panjang untuk keamanan nasionalnya. Dukungan ini membantu menciptakan dunia yang lebih aman, damai, dan sejahtera bagi generasi mendatang. Untuk itu Amerika Serikat harus terus memastikan Israel memiliki sumber daya yang cukup untuk melindungi warganya, baik saat ini maupun di masa depan.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel memberikan berbagai keuntungan strategis. Salah satunya adalah memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah melalui dukungan militer dan diplomatik kepada Israel termasuk pengamanan Selat Hormuz yang merupakan jalur energi penting. Dengan sanksi ekonomi dan operasi militer, Amerika Serikat berhasil menekan pengaruh Iran dan

membatasi dukungannya terhadap kelompok seperti Hizbullah dan Hamas. Melalui Abraham Accords, Amerika Serikat mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, sekaligus memperkuat aliansi untuk menekan pengaruh Iran. Selain itu, dukungan ini juga menguntungkan Amerika Serikat secara ekonomi karena sebagian dana bantuan militer untuk Israel digunakan untuk membeli persenjataan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Sehingga, hal ini membantu meningkatkan pendapatan sektor pertahanan dan mendorong perkembangan teknologi militer di Amerika Serikat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah di sampaikan dapat di simpulkan

1. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel didasarkan pada upaya menekankan pengaruh Iran secara ekonomi dan politik di tingkat domestik ataupun internasional. Dengan menggunakan *ratio choice theory*, Langkah ini merupakan perhitungan strategis untuk memaksimalkan kepentingan Amerika Serikat. Melalui penerapan sanksi ekonomi, pengawasan ketat program nuklir Iran, dan upaya diplomasi yang terukur, Amerika Serikat berupaya menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi dominasinya di Timur Tengah sekaligus membagi potensi ancaman yang muncul dari Iran sebagai faktor yang dianggap agresif
2. Amerika Serikat memiliki intensi untuk mempertahankan dan meningkatkan statusnya sebagai hegemon dengan cara mengontrol struktur kekuasaan yang mencakup pengaruh terhadap negara-negara sekutu dan kemampuan menciptakan aliansi strategis kebijakan seperti penguatan kehadiran militer di wilayah selat Hormuz dan teluk Oman menunjukkan bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan kekuatan militer untuk menjaga stabilitas kawasan, memastikan akses terhadap jalur energi vital, dan melindungi kepentingannya dalam sistem geopolitik internasional.
3. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam menghadapi ancaman Iran menjadi strategi dalam menjaga stabilitas kawasan, dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan militer tahunan sebesar \$38 miliar kepada Israel, Latihan militer bersama dan pengiriman sistem pertahanan udara seperti THAAD untuk memperkuat keamanan Israel dari segi misil dan drone Iran. Langkah ini agar Israel memiliki keunggulan strategi dalam menghadapi ancaman dari Iran dan kelompok-kelompok militannya.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel memperkuat dominasinya di Timur Tengah dengan mendukung Israel secara militer dan diplomatik, seperti mengamankan jalur energi Selat Hormuz, serta membatasi pengaruh Iran melalui sanksi dan operasi militer. Melalui Abraham Accords, AS mendorong normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan memperkuat aliansi untuk menekan pengaruh Iran. Selain itu, dukungan ini juga menguntungkan AS secara ekonomi karena Israel menggunakan sebagian dana bantuan militer untuk membeli persenjataan dari perusahaan AS. Sehingga, hal ini membantu meningkatkan pendapatan sektor pertahanan dan mendorong perkembangan teknologi militer di Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). POLITIK OFENSIF AMERIKA SERIKAT TERHADAP

- SIKAP DEFENSIF IRAN: DARI PERANG PROKSI HINGGA DOMINASI. Indonesian Journal of International Relations, 5(2), 118–139. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.203>
- Mustofa, A. Z. (2020). Perang Proksi Amerika Serikat Dan Iran Dalam Politik Global Pasca Arab Spring [Kajian Timur Tengah, UIN Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45778/1/18200010083_BAB-I_IV atau V_DAFTAR-PUSTAKA.pd
- Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah. Jurnal ICMES, 2(1). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=940151&val=14524&title=Perjanjian%20Nuklir%20Iran%20dan%20Pengaruhnya%20terhadap%20Kepentingan%20USA-Israel%20di%20Timur%20Tengah>
- Hafidz, D. A. W., Kusmin, A. F., Sajidin, M., Nuraliah, D., Nasiruddin, N., & Antuli, R. R. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah 36 sebagai Konsekuensi dari Politik Engtangling Alliance. Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik, 6(1), 22–38. <https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1>
- Suhayatmi, Rahmatulummah, A., & Anugrah Resky, S. (2024). Eskalasi Konflik Iran-Israel di Damaskus: Implikasi terhadap Stabilitas Keamanan Regional dan Global. Jurnal Hubungan Luar Negeri, 9(1). <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/49>

Internet Website

- Al Jazeera. (2020, January 8). Iran launches missile attacks on US facilities in Iraq. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/1/8/iran-launches-missile-attacks-on-us-facilities-in-iraq>
- Al Jazeera. (2023, January 29). Was Israel behind drone attack on Iran military installation. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/29/iran-calls-drones-attack-on-its-defense-plant-cowardly>
- Al Jazeera. (2023, October 9). Hezbollah fires on Israel after several members killed in shelling. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/9/hezbollah-fires-on-israel-after-several-members-killed-in-shelli>
- Al Jazeera. (2024, September 18). The history of conflict between Hezbollah and Israel. Al Jazeera
- Al-Shalchi, H., & Myre, G. (2024, October 1). Iran carries out a massive missile attack on Israel, expanding the Middle East conflict. NPR. <https://www.npr.org/2024/10/01/g-s1-25707/iran-israel-hezbollah-lebanon-attack>
- BBC. (2024, October 21). What is Hamas and why is it fighting with Israel in Gaza? BBC. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67039975>
- Berg, R. (2024, April 14). Israel on high alert after unprecedented Iranian attack. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68810053>
- Buchan, J. (2013). THE IRANIAN REVOLUTION OF 1979. Asian Affairs, 44(3), 418–426. <https://doi.org/10.1080/03068374.2013.826016>
- Furlan, M. (2022). Israeli-Iranian relations: past friendship, current hostility. Israel Affairs, 28(2), 170–183. <https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2041304>
- Graham, E., & Harrison. (2024, October 26). Joe Biden says he hopes latest Israeli strike on Iran will end escalation. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2024/oct/26/joe-biden-says-he-hopes-latest-israeli-strike-on-iran-will-end-escalatio>
- Sewell, A. (2024, August 1). Hamas' top political leader is killed in Iran in strike that risks triggering all-out regional war. The Associated Press. <https://apnews.com/article/iran-hamas-israel-30968a7acb31cd8b259de9650014b779>

- Marshall, A. (2016). From civil war to proxy war: past history and current dilemmas. *Small Wars and Insurgencies*, 27(2), 183–195. <https://doi.org/10.1080/09592318.2015.1129172>
- Nada, G. (2023, October 11). History of Iran-Israel Tensions. *The Iran Primer*. <https://iranprimer.usip.org/blog/2020/jan/21/iran%E2%80%99s-confrontation-israel-over-four-decades>
- USIP. (2020, December 16). U.S. Sanctions on Iran in 2020. *The Iran Primer*. <https://iranprimer.usip.org/blog/2020/dec/16/us-sanctions-iran-2020>
- USIP. (2022, July 31). Timeline: Israeli Attacks on Iran. *The Iran Primer*. <https://iranprimer.usip.org/blog/2022/aug/11/timeline-israeli-attacks-iran>
- USIP. (2024, September 25). Timeline of U.S. Sanctions. *The Iran Primer*. <https://iranprimer.usip.org/resource/timeline-us-sanctions>
- Sewell, A. (2024, August 1). Hamas' top political leader is killed in Iran in strike that risks triggering all-out regional war. *The Associated Press*. <https://apnews.com/article/iran-hamas-israel-30968a7acb31cd8b259de9650014b779>
- Thomas, C. (2024a). Iran: Background and U.S. Policy. <https://crsreports.congress.gov>
- Thomas, C. (2024b). Iran-Supported Groups in the Middle East and U.S. Policy. <https://crsreports.congress.gov>